



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1406, 2017

KEMENHUB. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 101 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa dengan bertambahnya beban, tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi serta telah dilakukannya evaluasi terhadap beberapa jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;
 - c. bahwa hasil evaluasi jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat

nomor B/235/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan UPT Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 928);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 784);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN.

Pasal I

Menambahkan beberapa jabatan struktural setara jabatan Administrator dan jabatan fungsional umum setara jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 784), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 101 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN
2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

REKAPITULASI

**KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	13	25
2	11	4
3	10	46
4	9	148
5	7	866
6	6	708
Total		1797

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 101 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG
 PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE A	13	13	

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
2	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE B	13	8	
3	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C	13	4	
4	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	9	21	
5	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	9	21	
6	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	13	
7	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN PERINTIS	9	8	
8	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN	9	4	
9	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	4	
10	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	4	

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	TOTAL		100	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 101 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG
PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI				
DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 1	11	4	

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
2	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 2	10	41	
3	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 3	9	53	
4	KOORDINATOR UPPKB KELAS 1	10	5	
5	KOORDINATOR UPPKB KELAS 2	9	20	
6	KOORDINATOR PELABUHAN ANGGKUTAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL	11	0	
7	KOORDINATOR PELABUHAN ANGGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS I	10	0	
8	KOORDINATOR PELABUHAN ANGGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS II	9	0	
9	KOORDINATOR PELABUHAN ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	9	0	
10	PEMROSES DATA TRANSPORTASI JALAN	7	12	

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
11	ANALIS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7	12	
12	PETUGAS PENCATATAN KEDATANGAN, KEBERANGKATAN, DAN FAKTOR MUAT	6	388	
13	PENGATUR LALU LINTAS	7	485	
14	PETUGAS PELAYANAN	7	97	
15	TEKNISI ELEKTRIKAL	6	10	
16	TEKNISI MEKANIKAL	6	10	
17	TEKNISI TERMINAL	6	40	
18	TEKNISI UPPKB	6	52	
19	PETUGAS PENCATAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, INVENTARISASI DAN PENGELUARAN BARANG	6	208	
20	PETUGAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	7	260	

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT				
No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
TOTAL			1730	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 101 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG
 PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelenggaraan & Manajerial (1-3)	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)
							Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KEPALA BALAI PENGELOLA	13	2,605	2 350	2 250	2 775	3 75	2 75	4 505	2 575

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelesaian & Manajerial (1-3)	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)
							Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORTASI DARAT TIPE A									
2	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE B	13	2,605	2	2	2	3	2	4	2
3	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C	13	2,605	2	2	2	3	2	4	2
4	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	9	1,430	1	1	1	1	1	3	1
5	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	9	1,430	1	1	1	1	1	3	1
6	KEPALA SEKSI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	1	1	1	1	3	1
7	KEPALA SEKSI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN PERINTIS	9	1,430	1	1	1	1	1	3	1

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyelidikan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)			Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)			
				1	5	1	3	1	3	8	9	10			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
8	KEPALA TRANSPORTASI JALAN SEKSI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
9	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
10	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 1	11	1,855	2	350	1	100	1	450	3	75	3	100	2	205	2	575
12	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 2	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
13	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 3	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyelidikan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)			Faktor 5 Kesulitan Pengerahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)		
				5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		
14	KOORDINATOR UPPKB TИPE 1	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
15	KOORDINATOR UPPKB TИPE 2	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575
16	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL	11	1,855	2	350	1	100	1	450	3	75	3	100	2	205	2	575
17	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS I	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
18	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS II	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575
19	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RIKHSYAH SUDHARNO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 101 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG
 PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)	Faktor 2 Pengawasan (1-5)	Faktor 3 Pedoman Level (1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (1-6)	Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEMROSES DATA TRANSPORTASI JALAN	7	890	4 550	1 25	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	1 5	1 5

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)	Faktor 2 Pengawasan (1-5)	Faktor 3 Pedoman Level (1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (1-6)	Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ANALIS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7	1,090	5 750	1 25	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	1 5	1 5
3	PETUGAS PENCATATAN KEDATANGAN, KEBERANGKATAN, DAN FAKTOR MUAT	6	755	3 350	1 25	2 125	2 75	2 75	3 60	1 20	1 5	2 20
4	PENGATUR LALU LINTAS	7	895	3 350	2 125	1 25	3 150	2 75	1 10	3 120	2 20	2 20
5	PETUGAS PMELAYANAN	7	1,080	3 350	1 25	3 275	2 75	3 150	3 60	3 120	2 20	1 5
6	TEKNISI ELEKTRIKAL	6	770	3 350	1 25	1 25	3 150	3 150	1 10	1 20	2 20	2 20
7	TEKNISI MEKANIKAL	6	770	3 350	1 25	1 25	3 150	3 150	1 10	1 20	2 20	2 20
8	TEKNISI TERMINAL	6	770	3 350	1 25	1 25	3 150	3 150	1 10	1 20	2 20	2 20

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)	Faktor 2 Pengawasan (1-5)	Faktor 3 Pedoman Level (1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (1-6)	Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	TEKNISI UPPKB	6	770	3	1	1	3	3	1	1	2	2
10	PETUGAS PENCATAAN, PENERIMAAN, PENYIMPANAN, INVENTARISASI DAN PENGELUARAN BARANG	6	755	3	1	2	2	2	3	1	1	2
11	PETUGAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	7	950	4	1	2	2	1	3	1	3	2

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI